

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan daerah dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Daerah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 6 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu, semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan PSAP No.1 paragraf 9 (PP No.71 tahun 2010) disebutkan bahwa:

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut (PSAP No.1 PP No.71 tahun 2010 paragraf 14) :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan menurut Diamond (2002) dalam Aliyah dan Nahar (2012) adalah hal yang sangat penting karna pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggungjawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola;
- b. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
- c. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban;
- d. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk menilai kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah di masa mendatang. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi (Aliyah dan Nahar, 2012)

2.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Pengertian aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Menurut Sanjaya dkk (2014) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, pasal 103 dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet). Informasi yang ditampilkan dalam SIKD tersebut dinyatakan secara jelas pada pasal 102, UU No.33 tahun 2004 meliputi:

- a. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota
- b. Neraca daerah
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan daerah
- e. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
- f. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah
- g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Sanjaya dkk, 2014). UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (pasal 1 ayat 2) menyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik merupakan hak publik atas informasi keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban dan pengelolaan dengan memberikan laporan keuangan. Sagala (2011) menyimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk mengetahui atau memperoleh informasi atas laporan keuangan berdasarkan prinsip mudah dan biaya murah.

2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP No.71 Tahun 2010 mendefinisikan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah menurut permendagri No. 13 tahun 2006. Sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim dan Iqbal 2012 dalam wiyana dan sutrisna, 2016). Pengelolaan keuangan yang baik membuat aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial dan akan menciptakan akuntabilitas publik.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan akuntabilitas yang dilakukan penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu

yang telah melakukan penelitian sebelumnya. Beberapa diantaranya yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penelitian yang ditampilkan dalam bentuk tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

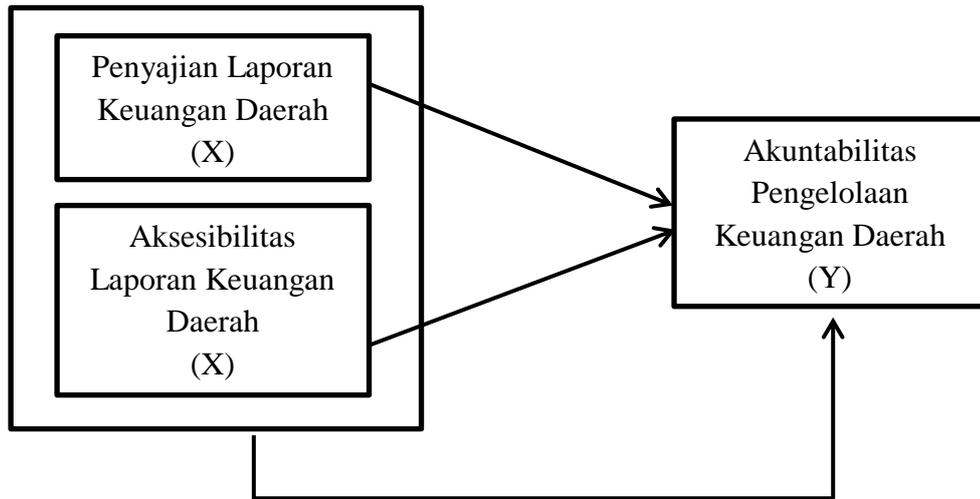
No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Kesimpulan
1	Saufi Iqbal Nasution (2010)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian laporan keuangan SKPD 2. Aksesibilitas laporan keuangan SKPD 3. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD 	Secara parsial dan atau bersama-sama penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.
2	Aliyah, siti dan aida nahar (2012)	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian laporan keuangan daerah 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah 3. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 	Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial.
3	Peggy sande (2013)	Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian laporan keuangan daerah 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah 3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 	Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4	Putu Sri Wahyuni dkk (2014)	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bandung	1. Penyajian laporan keuangan daerah 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah 3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
5	Salomi J. Hehanussa (2015)	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Ambon	1. Penyajian laporan keuangan daerah 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah 3. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
6	Hesti Kurniawati dan Magdalena (2016)	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan daerah, Sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1. Penyajian laporan keuangan daerah 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah 3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Penyajian laporan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan daerah dan Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Sumber: diolah penulis, 2017

2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013), Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Gambar 2.1 adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: diolah penulis, 2017

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H_1 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- H_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- H_3 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah secara silmutan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.